



RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN ANGGARAN 2025

**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KOTA PANGKALPINANG**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) adalah dokumen perencanaan yang dibuat oleh organisasi perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan kewajiban bagi setiap OPD. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan. Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Tahun 2025 ini menyajikan perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang yang merupakan Tahun Transisi Kepemimpinan Walikota Pangkalpinang yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan program pembangunan di bidang Kelautan dan Perikanan dengan Sasaran Menurunnya Tingkat Kemiskinan dengan prioritas Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan dengan arah kebijakan Peningkatan kapasitas produksi dan pengolahan hasil perikanan dengan mempertimbangkan keterbatasan kapasitas fiskal daerah untuk mengakomodir kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang sebagai salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di Kota Pangkalpinang mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang Kelautan dan Perikanan.

Agar pelaksanaan tugas yang telah ditetapkan dapat berjalan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja OPD menjadi mutlak. Oleh karena itu, Renja OPD adalah pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Berdasarkan Permendagri No 87 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Ranhir terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu: tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum OPD/lintas OPD, perumusan rancangan akhir dan penetapan. Pengusulan Rencana Awal (Ranwal) Tahun 2025 ini mengacu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021.

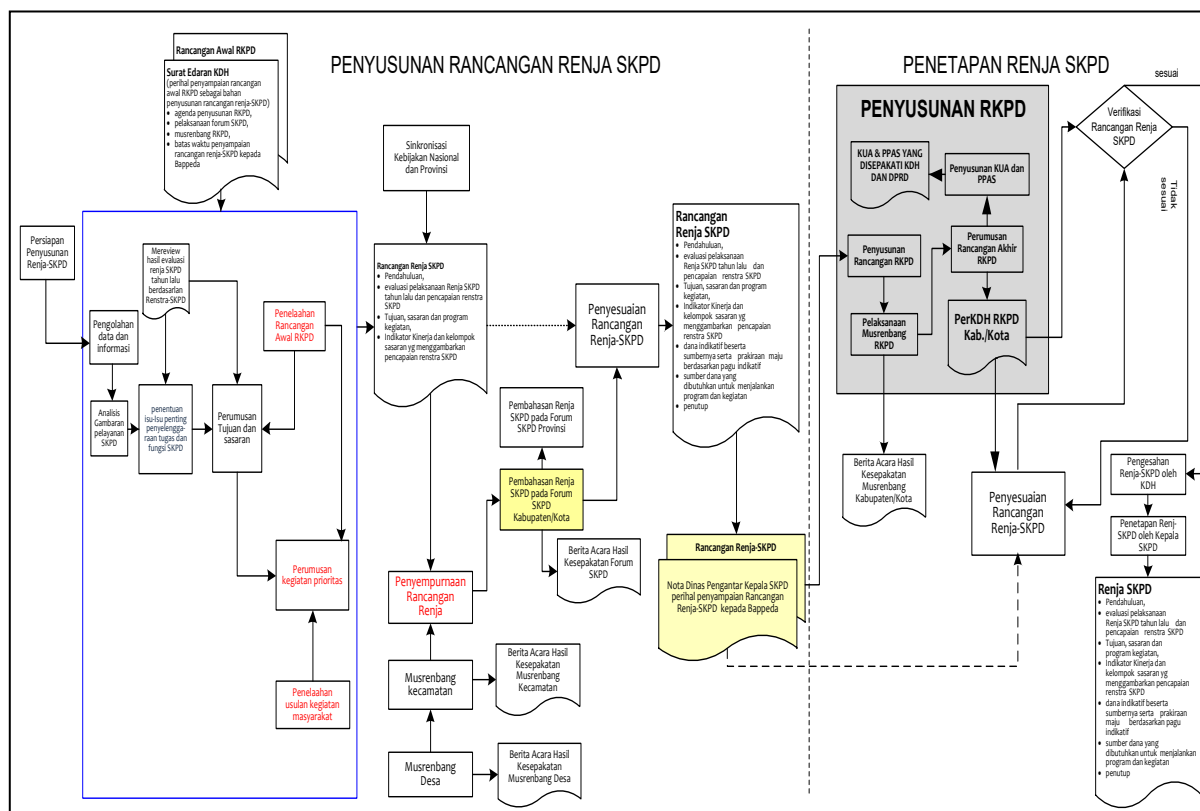
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Ranwal OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Ranwal OPD dapat dikerjakan secara simultan dengan penyusunan rancangan akhir RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD.

Prinsip Penyusunan Ranwal OPD terdiri atas:

1. Substansi Ranwal OPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Ranwal OPD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program ,kegiatan dan sub kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Ranhir OPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA OPD setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Adapun Bagan Alir Tahapan Penyusunan Rencana kerja Operasional Perangkat Daerah tercantum dalam gambar dibawah ini :

Gambar 1. Bagan Alir Tahapan Penyusunan Renja



1.2 Dasar Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang Tahun 2022 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2026 nomor 114, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah (lembaran negara republik indonesia tahun 2019 nomor 187, tambahan lembaran negara republik indonesia nomor 6402);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
10. Peraturan menteri dalam negri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah (berita negara republik indonesia tahun 2020 nomor 1781);
11. Keputusan menteri dalam negeri nomor 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan menteri dlam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
12. Peraturan daerah kota pangkalpinang nomor 18 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota pangkalpinang (lembaran daerah kota pangkalpinang tahun 2016 nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan praturan daerah kota pangkalpinang nomor 2 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas peraturan daerah kota pangkalpinang nomor 18 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah kota pangkalpinang.
13. Peraturan walikota pangkalpinang nomor 9 tahun 2023 tentang rencana pembangunan daerah kota pangkalpinang tahun 2025-2026 (berita daerah kota pangkalpinang tahun 2023 nomor 114).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang tahun 2025 adalah untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam mencapai prioritas pembangunan bidang kelautan dan perikanan selama kurun waktu satu tahun.

Tujuan penyusunan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang tahun 2025 adalah:

- a. Menjabarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2025
- b. Memberikan gambaran pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kelautan dan perikanan Kota Pangkalpinang tahun 2025.
- c. Sebagai bahan evaluasi untuk tahun selanjutnya agar perencanaan dapat berjalan sistematis, komprehensif dan tetap fokus pada pemecahan masalah.
- d. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta evaluasi hasil pembangunan di Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang.
- e. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja dalam pelaksanaan tugas.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang Tahun 2025 meliputi :

BAB I PENDAHULUAN

- Menjelaskan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN LALU

- Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang
- Review Terhadap Rancangan Awal Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang

BAB III TUJUAN, SASARAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PANGKALPINANG

- Menjelaskan Telaahan terhadap Kebijakan Nasional, Tujuan dan sasaran Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PANGKALPINANG

BAB V PENUTUP

- Menjelaskan catatan penting mengenai pelaksanaannya atau jika ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN 2025

Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang Tahun 2023, dapat dilihat pada uraian berikut ini :

2.1 Evaluasi Kinerja Tahun 2023

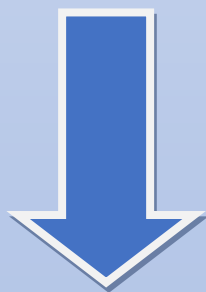
Evaluasi kinerja yang dimaksud dalam laporan ini adalah evaluasi internal yang penilaiannya dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan kota Pangkalpinang terhadap hasil pengukuran kinerja sasaran Dinas Kelautan Perikanan Analisis dilakukan dengan membandingkan antara realisasi atau kinerja nyata dengan yang direncanakan (target sasaran) setelah dievaluasi/ divalidasi dari Pusat (Kementrian Kelautan dan Perikanan)

Sasaran 1 : Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya, Perikanan Tangkap, untuk mengukur sasaran ini digunakan 3 indikator kinerja utama:

No	Indikator Kinerja	Tahun 2023		
		Target	Realisasi	%
1	Jumlah Produksi Perikanan (Total)	4,168, Ton	3.230,27 Ton	77 %
	Jumlah produksi perikanan budidaya	2.805 ton	1.764,18 ton (Nilai belum validasi)	62,89 %
2.	Jumlah produksi perikanan Tangkap	1.363 ton	1.466,09 (Nilai belum Validasi)	107 %
	Angka konsumsi ikan masyarakat	54,3 kg/kapita/tahun	72,91 (Nilai belum validasi)	131 %

Keterangan pada tabel Indikator Kinerja Utama (IKU) diatas maka dapat disimpulkan bahwa Jumlah produksi perikanan budidaya yang menjadi target tahun 2023 adalah 2.805 ton dan teralisasi sebesar 1.764,18 ton atau 62,89 % Jumlah produksi perikanan tangkap yang menjadi target tahun 2023 adalah 1.363 ton dan teralisasi sebesar 1.466,09 ton atau 107 %. Untuk jumlah nilai realisasi produksi perikanan tangkap dan budidaya adalah nilai data yang belum di validasi dari Kementerian Kelautan dan Perikanan .Angka konsumsi ikan yang menjadi target 2023 adalah 54,3 kg/kapita/tahun dan teralisasi sebesar 54,3 kg/kapita/tahun. Data angka konsumsi ikan diatas masih nilai estimasi dan belum divalidasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan. Semua data diatas merupakan data Estimasi/belum divalidasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang belum divalidasi, dikarenakan Data yang sudah di validasi dari Kementrian Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang biasanya diterima di bulan Maret atau paling lama disekitar bulan Mei. Usaha pencapaian indikator kinerja pada sasaran meningkatnya produksi perikanan budidaya, perikanan tangkap dan konsumsi ikan masyarakat didukung oleh 3 (tiga) program; 1) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap. 2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 3) Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

Untuk lebih jelas nya Evaluasi kinerja yang dimaksud dalam laporan ini dimana evaluasi internal yang penilaiannya dilakukan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan kota Pangkalpinang terhadap hasil pengukuran kinerja sasaran Dinas Kelautan Perikanan Tahun 2023 Analisis dilakukan dengan membandingkan antara realisasi atau kinerja nyata dengan yang direncanakan (target sasaran) dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:



No	Urusan	Perangkat Daerah Pelaksana	Kebijakan	Uraian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan (Satuan Indikator)	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran	Permasalahan	Upaya Mengatasi Permasalahan	Tindak Lanjut Rekomendasi DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan	Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2022 Nomor 33) tanggal 26 Desember 2022	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu (Dengan Satuan:%)	%	100	100	4.013.124.841	3.895.627.294			
			2.Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2023 Nomor 40) tanggal 5 Oktober 2023;		Persentase kontribusi retribusi daerah terhadap PAD (Dengan Satuan:%)	%	100	100					
					Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/kenfifikasi pada unit kerjanya (Dengan Satuan:%)	%	100	100					
					Persentase sarana dan prasarana Apratur dalam kondisi baik (Dengan Satuan:%)	%	100	100					
					Persentase terpenuhinya kebutuhan Administrasi perkantoran (Dengan Satuan:%)	%	100	100					
		032501202		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	laporan	1	1	2.319.588.341	2.250.911.542			
		032501202001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Dengan Satuan:Orang/bulan)	orang/bulan	20	20	2.319.588.341	2.250.911.542			
		032501205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	laporan	2	2	69.100.000	68.450.000			

		032501205002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Dengan Satuan:Paket)	Paket	63	63	44.100.000	43.785.000			
		032501205009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Orang)	Orang	5	5	25.000.000	24.665.000			
		032501206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	laporan	4	4	196.695.474	191.822.016			
		032501206001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Paket	1	1	1.271.100	1.148.881			
		032501206004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Paket	2	2	15.527.200	14.683.973			
		032501206005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Dengan Satuan:Paket)	Paket	1	1	18.017.700	14.115.100			
		032501206009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Dengan Satuan:Laporan)	laporan	1	1	161.879.474	161.874.062			
		032501207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	laporan	3	3	399.808.600	397.900.622			
		032501207005		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	Unit	4	4	15.926.600	15.809.000			
		032501207006		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	Unit	15	14	174.333.000	172.770.500			
		032501207010		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Dengan Satuan:Unit)	Unit	3	3	209.549.000	209.321.122			

		032501208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	Laporan	2	2	376.646.534	375.873.093			
		032501208003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	Laporan	1	1	4.012.000	3.947.100			
		032501208004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Dengan Satuan:Laporan)	Laporan	1	1	372.634.534	371.925.993			
		032501209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Dengan Satuan:Laporan)	Laporan	4	4	651.285.892	610.670.021			
		032501209001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Dengan Satuan:Unit)	Unit	1	1	65.181.696	61.231.986			
		032501209002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Dengan Satuan:Unit)	Unit	4	4	139.320.000	114.117.885			
		032501209009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	Unit	1	1	221.271.696	219.639.650			
		032501209010		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Dengan Satuan:Unit)	Unit	3	9	225.512.500	215.680.500			
	-	032503		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Jumlah produksi perikanan tangkap (Dengan Satuan:Ton)	Ton	1.363	1.466,09	366.569.372	359.700.718			

		032503201		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah laporan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota (Dengan Satuan:laporan)	Laporan	2	2	237.086.784	234.464.330			
		032503201001		Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dengan Satuan:Dokumen)	Dokumen	1	1	112.086.784	112.086.784			
		032503201002		Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Dengan Satuan:Unit)	Unit	80	80	125.000.000	122.377.546			
		032503202		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	Laporan	2	2	50.660.500	50.660.000			
		032503202001		Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Dengan Satuan:Orang)	Orang	30	30	21.060.500	21.060.000			
		032503202002		Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Dengan Satuan:Kelompok)	Kelompok	5	5	29.600.000	29.600.000			
		032503203		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Laporan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Dengan Satuan:Laporan)	Laporan	1	1	78.822.088	74.576.388			
		032503203002		Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Dengan Satuan:Layanan)	Unit	1	1	78.822.088	74.576.388			
	-	032504		PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah produksi perikanan Budidaya (Dengan Satuan:Ton)	Ton	2.805	1.764,18	1.313.104.012	1.288.175.201			

		032504202		Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Laporan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil (Dengan Satuan:Laporan)	Laporan	1	1	115.000.000	114.373.724			
		032504202004		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Dengan Satuan:Kelompok)	Kelompok	24	24	115.000.000	114.373.724			
		032504204		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Laporan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan (Dengan Satuan:Laporan)	Laporan	2	2	1.198.104.012	1.173.801.477			
		032504204001		Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Dokumen)	Dokumen	1	1	75.415.088	72.815.088			
		032504204003		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Unit)	Unit	1	1	1.122.688.924	1.100.986.389			
	-	032506		PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Meningkatnya Angka Konsumsi Ikan dan usaha pengolahan hasil perikanan (Dengan Satuan:Kg/Kapita/Tahun)	kg/kapita/thn	55,38	72,91	262.127.500	261.837.799			
		032506201		Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Laporan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil (Dengan Satuan:Laporan)	Laporan	1	1	113.027.500	112.847.799			
		032506201001		Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko (Dengan Satuan:Dokumen)	Dokumen	1	1	113.027.500	112.847.799			

		032506202		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Laporan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil (Dengan Satuan:Laporan)	Laporan	1		27.600.000	27.600.000			
		032506202001		Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko (Dengan Satuan:Unit Usaha)	Pelaku Usaha	30	30	27.600.000	27.600.000			
		032506203		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Laporan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dengan Satuan:Laporan)	Laporan	1	1	121.500.000	121.390.000			
		032506203002		Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Dengan Satuan:Pelaku Usaha)	Pelaku Usaha	15	15	121.500.000	121.390.000			
				TOTAL					5.954.925.725	5.805.341.012			

2.2 Evaluasi Realisasi Pendapatan dan Realisasi Anggaran Tahun 2023

2.2.1 Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang

Tabel 3. 2 Target Anggaran Pendapatan dan Realisasi Pendapatan

Kode Rekening	Uraian	Jumlah Anggaran	S/D BULAN LALU	BULAN INI	S/D BULAN INI	SISA ANGGARAN YANG BELUM TEREALISASI / PELAMPAUAN ANGGARAN
			PENERIMAAN			
			PENYETORAN			
			SISA			
4 . 1 . 02 . 02 . 11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	50.000.000,00	24.845.000,00	5.155.000,00	30.000.000,00	20.000.000,00
			0,00		0,00	
			0,00	0,00	0,00	
4 . 1 . 04 . 03 . 01	Hasil Sewa BMD (P2HP)	453.587.200,00	139.224.000,00	40.107.000,00	179.331.000,00	274.256.200,00
4 . 1 . 04 . 03 . 02	Hasil Kerjasama Pemanfaatan BMD (TPI)	-	17.734.400,00	86.930.000,00	104664400	-104.664.400,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	
JUMLAH		503.587.200,00	42.579.400,00	92.085.000,00	134.664.400,00	368.922.800,00
			0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	

2.2.2 Realisasi capaian target kinerja keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang untuk belanja daerah mencapai sebesar Rp. 503.587.200 (*lima ratus tiga juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah*) dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 313.995.400,00 (*tiga ratus tiga belas juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima empat ratus rupiah*).

**Tabel 2.2 Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023
(LRA)**

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	% 2023	REALISASI 2022
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	503.587.200	313.995.400,00	62,35	413.209.934,00
4.1.02	Retribusi Daerah	50.000.000	30.000.000,00	60,00	0,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	453.587.200	283.995.400,00	62,61	413.209.934,00
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	503.587.200	313.995.400,00	62,35	413.209.934,00
	JUMLAH PENDAPATAN	503.587.200	313.995.400,00	62,35	413.209.934,00
5	BELANJA DAERAH	5.954.925.725	5.805.341.012,00	97,49	8.131.687.428,00
5.1	BELANJA OPERASI	4.741.093.981	4.598.506.941,00	96,99	7.170.134.989,00
5.1.01	Belanja Pegawai	2.316.195.589	2.245.207.438,00	96,94	2.094.127.084,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	2.424.898.392	2.353.299.503,00	97,05	2.428.739.905,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	0	0,00	0,00	2.647.268.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	4.741.093.981	4.598.506.941,00	96,99	7.170.134.989,00
5.2	BELANJA MODAL	1.213.831.744	1.206.834.071,00	99,42	961.552.439,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	512.432.600	507.852.500,00	99,11	136.584.540,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	200.000.000	199.772.122,00	99,89	0,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	0	0,00	0,00	353.900.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	501.399.144	499.209.449,00	99,56	471.067.899,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	1.213.831.744	1.206.834.071,00	99,42	961.552.439,00
	JUMLAH BELANJA	5.954.925.725	5.805.341.012,00	97,49	8.131.687.428,00
	SURPLUS/DEFISIT	(5.451.338.525)	(5.491.345.612,00)	100,73	(7.718.477.494,00)

Untuk merealisasikan dan mencapai target-target sasaran melalui pencapaian target indikator kinerja utama dan realisasi belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang Tahun 2023 dapat dilihat penjelasannya dengan gambaran pada Tabel dibawah ini :

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PLAFOND DANA		REALISASI			SUMBER DANA	JENIS PEKERJAAN	KETERANGAN
		APBD INDUK	APBD PERUBAHAN	KEUANGAN		FISIK			
					%	%			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	4.483.038.496,00	5.954.925.725,00	5.805.341.012,00	97,49	99,99			
3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.143.624.680,00	4.013.124.841,00	3.895.627.294,00	97,07	99,98			
3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.218.210.557,00	2.319.588.341,00	2.250.911.542,00	97,04	99,96			
3.25.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.218.210.557,00	2.319.588.341,00	2.250.911.542,00	97,04	99,96	APBD Kota PKP		
5,1	BELANJA OPERASI	2.218.210.557,00	2.319.588.341,00	2.250.911.542,00					
5.1.01	Belanja Pegawai	2.209.595.805,00	2.310.803.589,00	2.242.183.438,00					
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	1.312.075.805,00	1.333.453.589,00	1.309.659.438,00		99,96			
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	994.821.972,00	992.008.639,00	989.727.829,00					
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	994.821.972,00	992.008.639,00	989.727.829,00					
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	107.618.944,00	107.618.944,00	104.626.812,00					
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	107.618.944,00	107.618.944,00	104.626.812,00					
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	120.000.000,00	142.115.000,00	131.937.790,00					
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	120.000.000,00	142.115.000,00	131.937.790,00					
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	23.677.500,00	23.677.500,00	18.750.000,00					
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	23.677.500,00	23.677.500,00	18.750.000,00					
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	64.432.074,00	66.499.680,00	63.874.440,00					
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	64.432.074,00	66.499.680,00	63.874.440,00					
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	1.513.806,00	1.513.806,00	728.209,00					
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	1.513.806,00	1.513.806,00	728.209,00					

5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	11.509,00	20.020,00	14.358,00					
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	11.509,00	20.020,00	14.358,00					
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	850.000.000,00	915.000.000,00	886.680.000,00		99,96			
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	850.000.000,00	915.000.000,00	886.680.000,00					
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	850.000.000,00	915.000.000,00	886.680.000,00					
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	47.520.000,00	62.350.000,00	45.844.000,00		99,96			
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	12.600.000,00	12.430.000,00	0,00					
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha- Pemakaian Kekayaan Daerah	12.600.000,00	12.430.000,00	0,00					
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	34.920.000,00	49.920.000,00	45.844.000,00					
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	34.920.000,00	49.920.000,00	45.844.000,00					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	8.614.752,00	8.784.752,00	8.728.104,00					
5.1.02.02	Belanja Jasa	8.614.752,00	8.784.752,00	8.728.104,00		99,96			
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi	8.614.752,00	8.784.752,00	8.728.104,00					
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	3.828.576,00	3.908.576,00	3.878.952,00					
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	4.786.176,00	4.876.176,00	4.849.152,00					
3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000,00	69.100.000,00	68.450.000,00	99,06	100,00			
3.25.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0,00	44.100.000,00	43.785.000,00	99,29	100,00	APBD Kota PKP		
5,1	BELANJA OPERASI	0,00	44.100.000,00	43.785.000,00					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	0,00	44.100.000,00	43.785.000,00					

5.1.02.01	Belanja Barang	0,00	44.100.000,00	43.785.000,00		100,00			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	0,00	44.100.000,00	43.785.000,00					
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	44.100.000,00	43.785.000,00					
3.25.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	5.000.000,00	25.000.000,00	24.665.000,00	98,66	100,00	APBD Kota PKP		
5,1	BELANJA OPERASI	5.000.000,00	25.000.000,00	24.665.000,00					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	25.000.000,00	24.665.000,00					
5.1.02.02	Belanja Jasa	5.000.000,00	25.000.000,00	24.665.000,00		100,00			
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.000.000,00	25.000.000,00	24.665.000,00					
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	5.000.000,00	25.000.000,00	24.665.000,00					
3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	90.762.121,00	196.695.474,00	191.822.016,00	97,52	99,96			
3.25.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.271.100,00	1.271.100,00	1.148.881,00	90,38	99,96	APBD Kota PKP		
5,1	BELANJA OPERASI	1.271.100,00	1.271.100,00	1.148.881,00					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.271.100,00	1.271.100,00	1.148.881,00					
5.1.02.01	Belanja Barang	1.271.100,00	1.271.100,00	1.148.881,00					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	1.271.100,00	1.271.100,00	1.148.881,00		99,96			
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	1.267.365,00	1.267.365,00	1.148.881,00					

5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.735,00	3.735,00	0,00					
3.25.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	14.377.200,00	15.527.200,00	14.683.973,00	94,57	99,96	APBD Kota PKP		
5,1	BELANJA OPERASI	14.377.200,00	15.527.200,00	14.683.973,00					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	14.377.200,00	15.527.200,00	14.683.973,00					
5.1.02.01	Belanja Barang	14.377.200,00	15.527.200,00	14.683.973,00					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	14.377.200,00	15.527.200,00	14.683.973,00		99,96			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor	12.511.034,00	13.661.034,00	13.301.973,00					
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	480.000,00	480.000,00	0,00		99,96			
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	166,00	166,00	0,00		99,96			
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	1.386.000,00	1.386.000,00	1.382.000,00		99,96			
3.25.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.017.500,00	18.017.700,00	14.115.100,00	78,34	99,96	APBD Kota PKP		
5,1	BELANJA OPERASI	15.017.500,00	18.017.700,00	14.115.100,00					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	15.017.500,00	18.017.700,00	14.115.100,00					
5.1.02.01	Belanja Barang	15.017.500,00	18.017.700,00	14.115.100,00					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	15.017.500,00	18.017.700,00	14.115.100,00		99,96			
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	15.016.080,00	18.016.280,00	14.115.100,00					
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.420,00	1.420,00	0,00					
3.25.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.096.321,00	161.879.474,00	161.874.062,00	100,00	99,96	APBD Kota PKP		

5,1	BELANJA OPERASI	60.096.321,00	161.879.474,00	161.874.062,00					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	60.096.321,00	161.879.474,00	161.874.062,00					
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	60.096.321,00	161.879.474,00	161.874.062,00		99,96			
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	60.096.321,00	161.879.474,00	161.874.062,00					
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	60.096.321,00	161.879.474,00	161.874.062,00					
3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	37.000.000,00	399.808.600,00	397.900.622,00	99,52	100,00			
3.25.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		15.926.600,00	15.809.000,00	99,26	100,00			
5.1	BELANJA OPERASI		459.000,00	459.000,00					
5.1.01	Belanja Pegawai		459.000,00	459.000,00					
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objek Lainnya		459.000,00	459.000,00					
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium		459.000,00	459.000,00					
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa		459.000,00	459.000,00					
5.2	Belanja Modal		15.467.600,00	15.350.000,00					
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		15.467.600,00	15.350.000,00					
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		15.467.600,00	15.350.000,00					
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi kerja/Rapat		15.467.600,00	15.350.000,00					
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat		15.467.600,00	15.350.000,00					
3.25.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.000.000,00	174.333.000,00	172.770.500,00	99,10	100,00	APBD Kota PKP		
5.1	BELANJA OPERASI		918.000,00	918.000,00					
5.1.01	Belanja Pegawai		918.000,00	918.000,00		100,00			

5.1.01.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objek Lainnya		918.000,00	918.000,00					
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium		918.000,00	918.000,00					
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa		918.000,00	918.000,00					
5,2	BELANJA MODAL	37.000.000,00	173.415.000,00	171.852.500,00					
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37.000.000,00	173.415.000,00	171.852.500,00					
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah tangga		69.650.000,00	69.500.000,00					
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga		69.650.000,00	69.500.000,00		100,00			
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin		69.650.000,00	69.500.000,00					
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar		13.265.000,00	13.000.000,00		100,00			
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio		13.265.000,00	13.000.000,00					
5.2.02.06.01.0003	Belanja Modal Alat Studio Gambar		13.265.000,00	13.000.000,00					
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	37.000.000,00	90.500.000,00	89.352.500,00					
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	33.000.000,00	86.500.000,00	85.467.500,00		100,00			
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	18.000.000,00	18.000.000,00	17.593.500,00					
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	15.000.000,00	68.500.000,00	67.874.000,00					
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	4.000.000,00	4.000.000,00	3.885.000,00		100,00			
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	4.000.000,00	4.000.000,00	3.885.000,00					
3.25.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		209.549.000,00	209.321.122,00	99,89	100,00			
5.1	BELANJA OPERASI		549.000,00	549.000,00					
5.1.01	Belanja Pegawai		549.000,00	549.000,00					

5.1.01.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objek Lainnya		549.000,00	549.000,00		100,00			
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium		549.000,00	549.000,00					
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa		549.000,00	549.000,00					
5,2	BELANJA MODAL		209.000.000,00	208.772.122,00					
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		209.000.000,00	208.772.122,00					
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah tangga		9.000.000,00	9.000.000,00		100,00			
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor		9.000.000,00	9.000.000,00					
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya		9.000.000,00	9.000.000,00					
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		200.000.000,00	199.772.122,00		100,00			
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung		200.000.000,00	199.772.122,00					
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja		200.000.000,00	199.772.122,00					
5.2.03.01.01.0030	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya		200.000.000,00	199.772.122,00					
3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	370.078.610,00	376.646.534,00	375.873.093,00	99,79	99,98			
3.25.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.012.000,00	4.012.000,00	3.947.100,00	98,38	100,00	APBD Kota PKP		
5,1	BELANJA OPERASI	4.012.000,00	4.012.000,00	3.947.100,00					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	4.012.000,00	4.012.000,00	3.947.100,00					
5.1.02.01	Belanja Barang	64.900,00	64.900,00	0,00					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	64.900,00	64.900,00	0,00					
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	64.900,00	64.900,00	0,00					
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	3.947.100,00	3.947.100,00	3.947.100,00					
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.947.100,00	3.947.100,00	3.947.100,00		100,00			

5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	947.100,00	947.100,00	947.100,00					
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00					
3.25.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	366.066.610,00	372.634.534,00	371.925.993,00	99,81	99,96	APBD Kota PKP		
5,1	BELANJA OPERASI	366.066.610,00	372.634.534,00	371.925.993,00					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	366.066.610,00	372.634.534,00	371.925.993,00					
5.1.02.01	Belanja Barang	4.991.170,00	4.991.170,00	4.282.629,00					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	4.991.170,00	4.991.170,00	4.282.629,00		99,96			
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	1.280.000,00	1.280.000,00	780.000,00					
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	3.244.775,00	3.244.775,00	3.037.629,00					
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	466.395,00	466.395,00	465.000,00					
5.1.02.02	Belanja Jasa	361.075.440,00	367.643.364,00	367.643.364,00					
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	361.075.440,00	367.643.364,00	367.643.364,00		99,96			
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	75.815.088,00	75.815.088,00	75.815.088,00					
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	130.358.480,00	136.926.404,00	136.926.404,00					
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	48.543.392,00	48.543.392,00	48.543.392,00					
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	106.358.480,00	106.358.480,00	106.358.480,00					
3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	422.573.392,00	651.285.892,00	610.670.021,00	93,76	99,97			

3.25.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	61.981.696,00	65.181.696,00	61.231.986,00	93,94	99,96	APBD Kota PKP		
5,1	BELANJA OPERASI	61.981.696,00	65.181.696,00	61.231.986,00					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.981.696,00	65.181.696,00	61.231.986,00					
5.1.02.02	Belanja Jasa	23.731.696,00	26.931.696,00	23.124.196,00					
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	23.731.696,00	26.931.696,00	23.124.196,00		99,96			
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	21.931.696,00	21.931.696,00	21.931.696,00					
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	1.800.000,00	5.000.000,00	1.192.500,00					
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	38.250.000,00	38.250.000,00	38.107.790,00					
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38.250.000,00	38.250.000,00	38.107.790,00		99,96			
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	38.250.000,00	38.250.000,00	38.107.790,00					
3.25.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	139.320.000,00	139.320.000,00	114.117.885,00	81,91	99,96	APBD Kota PKP		
5,1	BELANJA OPERASI	139.320.000,00	139.320.000,00	114.117.885,00					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	139.320.000,00	139.320.000,00	114.117.885,00					
5.1.02.02	Belanja Jasa	6.000.000,00	6.000.000,00	5.002.500,00					
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6.000.000,00	6.000.000,00	5.002.500,00		99,96			
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	6.000.000,00	6.000.000,00	5.002.500,00					
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	133.320.000,00	133.320.000,00	109.115.385,00					
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	133.320.000,00	133.320.000,00	109.115.385,00		99,96			

5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	133.320.000,00	133.320.000,00	109.115.385,00					
3.25.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	221.271.696,00	221.271.696,00	219.639.650,00	99,26	99,97	APBD Kota PKP		
5,1	BELANJA OPERASI	23.400.696,00	23.400.696,00	21.971.696,00		99,96			
5.1.01	Belanja Pegawai	1.229.000,00	1.229.000,00	0,00					
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.229.000,00	1.229.000,00	0,00					
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.229.000,00	1.229.000,00	0,00					
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.229.000,00	1.229.000,00	0,00					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	22.171.696,00	22.171.696,00	21.971.696,00					
5.1.02.01	Belanja Barang	900.000,00	900.000,00	700.000,00					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	900.000,00	900.000,00	700.000,00		99,96			
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	900.000,00	900.000,00	700.000,00					
5.1.02.02	Belanja Jasa	21.271.696,00	21.271.696,00	21.271.696,00					
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	21.271.696,00	21.271.696,00	21.271.696,00		99,96			
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	21.271.696,00	21.271.696,00	21.271.696,00					
5,2	BELANJA MODAL	197.871.000,00	197.871.000,00	197.667.954,00		100,00			
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	197.871.000,00	197.871.000,00	197.667.954,00					
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	197.871.000,00	197.871.000,00	197.667.954,00					
5.2.05.07.01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	197.871.000,00	197.871.000,00	197.667.954,00					
5.2.05.07.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi	197.871.000,00	197.871.000,00	197.667.954,00					

3.25.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		225.512.500,00	215.680.500,00	95,64	99,97			
5.1	BELANJA OPERASI		225.512.500,00	215.680.500,00					
5.1.01	Belanja Pegawai		1.098.000,00	1.098.000,00					
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objek Lainnya		1.098.000,00	1.098.000,00		99,96			
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium		1.098.000,00	1.098.000,00					
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa		1.098.000,00	1.098.000,00					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		44.414.500,00	35.182.500,00					
5.1.02.02	Belanja Jasa		44.414.500,00	35.182.500,00		99,96			
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		44.414.500,00	35.182.500,00					
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air dan Listrik		44.414.500,00	35.182.500,00					
5,2	BELANJA MODAL		180.000.000,00	179.400.000,00					
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		180.000.000,00	179.400.000,00		100,00			
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah tangga		180.000.000,00	179.400.000,00					
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor		180.000.000,00	179.400.000,00					
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya		180.000.000,00	179.400.000,00					
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	366.569.372,00	366.569.372,00	359.700.718,00	98,13	99,99			
3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	237.086.784,00	237.086.784,00	234.464.330,00	98,89	99,98			

3.25.03.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	112.086.784,00	112.086.784,00	112.086.784,00	100,00	99,96	APBD Kota PKP		
5,1	BELANJA OPERASI	112.086.784,00	112.086.784,00	112.086.784,00					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	112.086.784,00	112.086.784,00	112.086.784,00					
5.1.02.02	Belanja Jasa	91.086.784,00	91.086.784,00	91.086.784,00					
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	91.086.784,00	91.086.784,00	91.086.784,00		99,96			
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	91.086.784,00	91.086.784,00	91.086.784,00					
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00					
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00		99,96			
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00					
3.25.03.2.01.02	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	125.000.000,00	125.000.000,00	122.377.546,00	97,90	100,00	APBD Kota PKP		
5,1	BELANJA OPERASI	125.000.000,00	125.000.000,00	122.377.546,00					
5.1.01	Belanja Pegawai	1.139.000,00	1.139.000,00	0,00					
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	1.139.000,00	1.139.000,00	0,00					
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	1.139.000,00	1.139.000,00	0,00		0,00			
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	1.139.000,00	1.139.000,00	0,00					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	123.861.000,00	123.861.000,00	122.377.546,00					
5.1.02.01	Belanja Barang	83.861.000,00	83.861.000,00	82.610.000,00					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	83.861.000,00	83.861.000,00	82.610.000,00		100,00			
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor (Tali rafia)	60.000,00	60.000,00	60.000,00					
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.000,00	1.000,00	0,00					

5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat	83.800.000,00	83.800.000,00	82.550.000,00					
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	39.767.546,00					
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	40.000.000,00	40.000.000,00	39.767.546,00	99,42	100,00			
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.000.000,00	40.000.000,00	39.767.546,00					
3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	50.660.500,00	50.660.500,00	50.660.000,00	100,00	100,00			
3.25.03.2.02.01	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	21.060.500,00	21.060.500,00	21.060.000,00	100,00	100,00	APBD Kota PKP		
5,1	BELANJA OPERASI	21.060.500,00	21.060.500,00	21.060.000,00					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	21.060.500,00	21.060.500,00	21.060.000,00					
5.1.02.01	Belanja Barang	11.710.500,00	11.710.500,00	11.710.000,00					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	11.710.500,00	11.710.500,00	11.710.000,00		100,00			
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	258.000,00	258.000,00	258.000,00					
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	4.850.000,00	4.850.000,00	4.850.000,00					
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	52.000,00	52.000,00	52.000,00					
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	500,00	500,00	0,00					
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00					
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00					
5.1.02.02	Belanja Jasa	6.350.000,00	6.350.000,00	6.350.000,00					
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00		100,00			
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00					
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00		100,00			

5.1.02.02.04.0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00					
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00					
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		100,00			
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00					
3.25.03.2.02.02	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	29.600.000,00	29.600.000,00	29.600.000,00	100,00	100,00	APBD Kota PKP		
5,1	BELANJA OPERASI	29.600.000,00	29.600.000,00	29.600.000,00					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	29.600.000,00	29.600.000,00	29.600.000,00					
5.1.02.01	Belanja Barang	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00		100,00			
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00					
5.1.02.02	Belanja Jasa	19.800.000,00	19.800.000,00	19.800.000,00					
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00		100,00			
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	9.800.000,00	9.800.000,00	9.800.000,00					
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		100,00			
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00					
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00					
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		100,00			
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00					

3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	78.822.088,00	78.822.088,00	74.576.388,00	94,61	99,98			
3.25.03.2.03.02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	78.822.088,00	78.822.088,00	74.576.388,00	94,61	99,98	APBD Kota PKP		
5,1	BELANJA OPERASI	78.272.088,00	78.272.088,00	74.026.388,00					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	78.272.088,00	78.272.088,00	74.026.388,00					
5.1.02.01	Belanja Barang	9.657.000,00	9.657.000,00	9.655.800,00					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.657.000,00	9.657.000,00	9.655.800,00		99,96			
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	230.000,00	230.000,00	230.000,00					
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	5.010.800,00	5.010.800,00	5.010.800,00					
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	665.000,00	665.000,00	665.000,00					
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.200,00	1.200,00	0,00					
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00					
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	2.550.000,00	2.550.000,00	2.550.000,00					
5.1.02.02	Belanja Jasa	68.615.088,00	68.615.088,00	64.370.588,00					
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	68.615.088,00	68.615.088,00	64.370.588,00		99,96			
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	21.271.696,00	21.271.696,00	21.271.696,00					
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	21.271.696,00	21.271.696,00	21.271.696,00					
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	21.271.696,00	21.271.696,00	21.271.696,00					
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	4.800.000,00	4.800.000,00	555.500,00					
5,2	BELANJA MODAL	550.000,00	550.000,00	550.000,00					
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	550.000,00	550.000,00	550.000,00		100,00			
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	550.000,00	550.000,00	550.000,00					

5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	550.000,00	550.000,00	550.000,00		100,00			
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	550.000,00	550.000,00	550.000,00					
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	762.511.944,00	1.313.104.012,00	1.288.175.201,00	98,10	99,99			
3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	115.000.000,00	115.000.000,00	114.373.724,00	99,46	100,00			
3.25.04.2.02.04	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	115.000.000,00	115.000.000,00	114.373.724,00	99,46	100,00	APBD Kota PKP		
5,1	BELANJA OPERASI	115.000.000,00	115.000.000,00	114.373.724,00					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	115.000.000,00	115.000.000,00	114.373.724,00					
5.1.02.01	Belanja Barang	13.112.000,00	13.112.000,00	13.112.000,00					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	13.112.000,00	13.112.000,00	13.112.000,00		100,00			
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	1.512.000,00	1.512.000,00	1.512.000,00					
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	11.600.000,00	11.600.000,00	11.600.000,00					
5.1.02.02	Belanja Jasa	61.888.000,00	61.888.000,00	61.848.000,00					
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	61.888.000,00	61.888.000,00	61.848.000,00		100,00			
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	61.888.000,00	61.888.000,00	61.848.000,00					
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	39.413.724,00					
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	40.000.000,00	40.000.000,00	39.413.724,00		100,00			
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.000.000,00	40.000.000,00	39.413.724,00					
3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	647.511.944,00	1.198.104.012,00	1.173.801.477,00	97,97	99,97			

3.25.04.2.04.01	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	72.815.088,00	75.415.088,00	72.815.088,00	96,55	99,96	APBD Kota PKP		
5,1	BELANJA OPERASI	72.815.088,00	75.415.088,00	72.815.088,00					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	72.815.088,00	75.415.088,00	72.815.088,00					
5.1.02.02	Belanja Jasa	72.815.088,00	75.415.088,00	72.815.088,00					
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	72.815.088,00	75.415.088,00	72.815.088,00		99,96			
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan		2.600.000,00						
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	72.815.088,00	72.815.088,00	72.815.088,00					
3.25.04.2.04.03	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	574.696.856,00	1.122.688.924,00	1.100.986.389,00	98,07	99,99	APBD Kota PKP		
5,1	BELANJA OPERASI	539.196.856,00	685.160.780,00	667.744.894,00					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	539.196.856,00	685.160.780,00	667.744.894,00					
5.1.02.01	Belanja Barang	212.508.200,00	294.904.200,00	294.244.100,00					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	212.508.200,00	294.904.200,00	294.244.100,00	99,78	100,00			
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	12.623.500,00	68.723.500,00	68.723.500,00					
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00					
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	156.600,00	156.600,00	156.600,00					
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		560.000,00	560.000,00					
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor	5.906.000,00	5.906.000,00	5.906.000,00					
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik	1.113.000,00	1.113.000,00	1.113.000,00					

5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	4.450.100,00	11.450.100,00	11.450.000,00					
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	1.500.000,00	1.836.000,00	1.836.000,00					
5.1.02.01.01.0044	Belanja Natura dan Pakan-Pakan	163.160.000,00	163.160.000,00	162.500.000,00					
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	5.599.000,00	5.599.000,00	5.599.000,00					
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		5.400.000,00	5.400.000,00					
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	10.000.000,00	23.000.000,00	23.000.000,00					
5.1.02.02	Belanja Jasa	282.988.656,00	322.556.580,00	309.535.632,00					
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	282.988.656,00	301.956.580,00	288.935.632,00		99,96			
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara dan Panitia		700.000,00	700.000,00					
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	45.543.392,00	45.543.392,00	45.543.392,00					
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	173.173.568,00	178.241.492,00	178.241.492,00					
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	21.271.696,00	21.271.696,00	21.271.696,00					
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	42.000.000,00	55.200.000,00	42.519.152,00					
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	1.000.000,00	1.000.000,00	659.900,00					
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin		5.600.000,00	5.600.000,00					
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Bantu Lainnya		2.500.000,00	2.500.000,00					
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya		3.100.000,00	3.100.000,00					
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan		15.000.000,00	15.000.000,00					
5.1.02.02.05.0029	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan Peternakan/Perikanan		15.000.000,00	15.000.000,00					
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00					

5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00		99,96			
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00					
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00					
5.1.02.03.02.0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	800.000,00	800.000,00	0,00					
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	40.000.000,00	40.000.000,00	39.965.162,00					
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	40.000.000,00	40.000.000,00	39.965.162,00	99,91	100,00			
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	40.000.000,00	40.000.000,00	39.965.162,00					
5.1.02.05	Belanja uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/Masyarakat	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00					
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/Masyarakat	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00					
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00					
5,2	BELANJA MODAL	35.500.000,00	437.528.144,00	433.241.495,00					
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	35.500.000,00	134.000.000,00	131.700.000,00					
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	35.500.000,00	134.000.000,00	131.700.000,00					
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	8.000.000,00	106.500.000,00	104.200.000,00		100,00			
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	8.000.000,00	106.500.000,00	104.200.000,00					
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	27.500.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00		100,00			
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	27.500.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00					
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		303.528.144,00	301.541.495,00		100,00			
5.2.05.07	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi		303.528.144,00	301.541.495,00					

5.2.05.07.01	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi		303.528.144,00	301.541.495,00					
5.2.05.07.01.0001	Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi		303.528.144,00	301.541.495,00					
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	210.332.500,00	262.127.500,00	261.837.799,00	99,89	100,00			
3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	61.232.500,00	113.027.500,00	112.847.799,00	99,84	99,99			
3.25.06.2.01.01	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	61.232.500,00	113.027.500,00	112.847.799,00	99,84	99,99	APBD Kota PKP		
5,1	BELANJA OPERASI	61.232.500,00	113.027.500,00	112.847.799,00					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	61.232.500,00	113.027.500,00	112.847.799,00					
5.1.02.01	Belanja Barang	9.452.500,00	58.197.500,00	58.197.500,00					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	9.452.500,00	58.197.500,00	58.197.500,00		100,00			
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Baku	4.452.500,00	4.452.500,00	4.452.500,00					
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat /bahan untuk kegiatan kantor- Alat Tulis Kantor		1.000.000,00	1.000.000,00					
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat /bahan untuk kegiatan kantor- Bahan Cetak		220.000,00	220.000,00					
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat /bahan untuk kegiatan kantor- Benda Pos		50.000,00	50.000,00					
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat		45.000.000,00	45.000.000,00					
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	650.000,00	650.000,00	650.000,00					

5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	4.350.000,00	6.825.000,00	6.825.000,00					
5.1.02.02	Belanja Jasa	11.200.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00					
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	6.200.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00		100,00			
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	700.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00					
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00					
5.1.02.02.01.0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00					
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00		100,00			
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00					
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	28.955.000,00	30.205.000,00	30.025.299,00					
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	28.955.000,00	30.205.000,00	30.025.299,00		99,96			
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	28.955.000,00	28.955.000,00	28.775.299,00					
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		1.250.000,00	1.250.000,00					
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.625.000,00	11.625.000,00	11.625.000,00					
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.625.000,00	11.625.000,00	11.625.000,00		100,00			
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	11.625.000,00	11.625.000,00	11.625.000,00					
3.25.06.2.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	27.600.000,00	27.600.000,00	27.600.000,00	100,00	100,00			
3.25.06.2.02.01	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	27.600.000,00	27.600.000,00	27.600.000,00	100,00	100,00	APBD Kota PKP		

5,1	BELANJA OPERASI	27.600.000,00	27.600.000,00	27.600.000,00					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	27.600.000,00	27.600.000,00					
5.1.02.01	Belanja Barang	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00					
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00		100,00			
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00					
5.1.02.02	Belanja Jasa	18.600.000,00	18.600.000,00	18.600.000,00					
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	8.600.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00		100,00			
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	8.600.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00					
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00		100,00			
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00					
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00					
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00		100,00			
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00					
3.25.06.2.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	121.500.000,00	121.500.000,00	121.390.000,00	99,91	100,00			
3.25.06.2.03.02	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	121.500.000,00	121.500.000,00	121.390.000,00	99,91	100,00	APBD Kota PKP		
5,1	BELANJA OPERASI	121.500.000,00	121.500.000,00	121.390.000,00					
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	12.000.000,00	11.890.000,00					
5.1.02.01	Belanja Barang	109.500.000,00	109.500.000,00	109.500.000,00		100,00			
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	109.500.000,00	109.500.000,00	109.500.000,00					

5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat	109.500.000,00	109.500.000,00	109.500.000,00					
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	12.000.000,00	12.000.000,00	11.890.000,00					
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	12.000.000,00	12.000.000,00	11.890.000,00		100,00			
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	12.000.000,00	12.000.000,00	11.890.000,00					

2.2.1 Review terhadap Rancangan awal OPD

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dengan periode 1 tahun yang memuat daftar program dan kegiatan yang bersumber dari APBD. RKPD disusun untuk menjabarkan RPJMD yang menjadi acuan proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) sebelum ditetapkan menjadi dokumen RKPD. Review terhadap rancangan awal perlu dilakukan untuk mengakomodir kebutuhan OPD yang belum tercantum dalam rancangan RKPD. Berikut review terhadap rancangan awal OPD dapat dilihat pada **Tabel 3** dibawah ini:



Tabel 3. Review Rancangan Awal OPD Tahun 2025

RANCANGAN AWAL OPD PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET CAPAIAN KINERJA	PAGU INDIKATIF (Rp.)	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN PROGRAM/KEGIATAN	CATATAN PENTING
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	SKPD	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu		4.534.593.175		
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	SKPD	Presentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Keuangan		2.723.846.675		
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	SKPD	Jumlah ASN yang menerima gaji dan tunjangan	20 orang	2.723.846.675		
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	SKPD	Presentase terpenuhinya Administrasi Kepegawaian		140.000.000		
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	SKPD	Jumlah pegawai yang mengikuti diklat sesuai tupoksi	3 orang	140.000.000		
Administrasi Umum Perangkat Daerah	SKPD	Presentase terpenuhinya administrasi Umum		240.526.500		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	SKPD	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	1.547.000		
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	SKPD	Jumlah bahan logistik kantor yang tersedia	2 paket	29.358.500		
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	SKPD	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	1 paket	9.621.000		
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	1 laporan	200.000.000		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	SKPD	Presentase terpenuhi Pengadaan Barang Milik Daerah		29.400.000		

Pengadaan Peralatan dan mesin lainnya	SKPD	Jumlah peralatan dan mesin yang tersedia	4 Jenis	29.400.000		
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	SKPD	Presentase Terpenuhinya Penyediaan Jasa		563.270.000		
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	SKPD	Jumlah jenis Layanan Komunikasi sumber daya air dan listrik yang tertangani	2 jenis	72.000.000		
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	SKPD	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	13 unit/set	8.850.000		
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	SKPD	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	22 Orang	482.420.000		
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	SKPD	Presentase terepenuhinya Pemeliharaan Barang Milik Daerah		837.550.000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	SKPD	Jumlah kendaraan perorangan dinas/jabatan yang dipelihara	1 unit	43.810.000		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	SKPD	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	4 unit	152.720.000		
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	SKPD	Jumlah gedung kantor /bangunan lainnya yang dipelihara	1 unit	641.020.000		
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	SKPD	Peningkatan produksi perikanan tangkap		179.956.000		
Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	SKPD	Penyediaan data dan sarana prasaran usaha perikanan tangkap		113.812.500		

Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	SKPD	Jumlah dokumen yang tervalidasi	1 Dokumen	20.212.500		
Penyediaan prasarana Usaha Perikanan Tangkap	SKPD	Jumlah kelompok yang mendapat bantuan	1 Jenis	75.263.475		
Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	SKPD	Jumlah nelayan yang terfasilitasi		58.150.000		
Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	SKPD	Jumlah kelompok yang mendapat bantuan	5	58.150.000		
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	SKPD	Terlaksananya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan		7.993.500		
Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	SKPD	Jumlah UPT TPI yang beroperasi	1 Unit	7.993.500		
PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	SKPD	Peningkatan produksi perikanan Budidaya		695.313.549		
Pemberdayaan Pembudidaya ikan kecil	SKPD			313.655.821		
Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta	SKPD			313.655.821		
Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	SKPD	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya		381.657.728		
Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	SKPD	Jumlah dokumen yang tervalidasi	1 Dokumen	54.660.000		
PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	SKPD	Meningkatnya AKI (Angka Konsumsi Ikan) dan usaha pengolahan hasil perikanan		106.879.281		

Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	SKPD	Jumlah tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan yang diterbitkan		106.879.281		
Total						

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PANGKALPINANG

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pembangunan Bidang Kelautan dan Perikanan di Kota Pangkalpinang yang diselaraskan dengan arah pembangunan dan program pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD, maupun Rencana Strategis Transisi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang 2024-2026 digunakan sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan.

Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Dinas Kelautan dan perikanan 2024-2026 disusun dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 2024-2026.

Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang

Tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang untuk OPD Pengampu Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang adalah Tujuan 2 yaitu : “Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat yang berdaya saing” dengan indikator tujuan Tingkat kemiskinan.

Dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pangkalpinang untuk OPD Pengampu Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang adalah Sasaran 5 yaitu :Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat dengan indikator sasaran Gini Rasio.

a. Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 adalah

1. Meningkatkan Nilai Tukar Nelayan (NTN).
2. Meningkatkan Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI)

Dengan Indikator Tujuan

1. Nilai Tukar Nelayan (NTN)
2. Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPI)



b. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan tujuan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap
2. Meningkatkan Produksi Perikanan Budidaya
3. Meningkatkan Angka Konsumsi Ikan (AKI)

Berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 dapat dilihat hubungan tujuan dan sasaran RPD dengan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang pada tabel dibawah ini :



Tabel 4.1 Hubungan Tujuan dan Sasaran RPD dengan Renstra Dinas

Tujuan	Indikat or Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formula/Rumus	Satuan	Target		
						2024	2025	2026
RPD Kota Pangkalpinang								
Mewujudkan kemandirian ekonomi dan pembangunan infrastruktur melalui pengelolaan lingkungan hidup	Tingkat kemiskinan					4,25	4,2	4,15
		Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat	Gini ratio			0.243	0,235	0,233
Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan								
Meningkatnya Nilai Tukar Nelayan (NTN)	Nilai Tukar Nelayan (NTN)			Jumlah Nilai Tukar Nelayan tahun berkenaan / Target Nilai Tukar Nelayan tahun berkenaan x 100%	%	113,77	114,05	114,34
		Meningkatkan Produksi Perikanan Tangkap	Produksi perikanan tangkap	Jumlah Produksi perikanan tangkap tahun berkenaan(ton) / Target produksi tangkap tahun berkenaan (ton) x 100%	%	90,90	90,91	90,91
		Meningkatnya angka konsumsi ikan	angka konsumsi ikan per tahun	jumlah konsumsi ikan (kg)/target konsumsi ikan tahun berkenaan x 100%	%	98,02	98,04	98,33
Meningkatnya Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)			Jumlah Nilai Tukar Nelayan tahun berkenaan / Target Nilai Tukar tahun berkenaan x 100%	%	92	92,5	93
		meningkatkan produksi perikanan budidaya	produksi perikanan budidaya	jumlah produksi perikanan budidaya tahun berkenaan (ton)/target produksi ikan budidaya tahun berkenaan (ton) x 100%	%	95	96,47	100

2.2.Strategi dan Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan

a. Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana PD mencapai tujuan dan sasaran secara dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan tranformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi.

Untuk merumuskan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, untuk itulah perlu dilakukan analisis terhadap faktor-faktor tersebut.

Strategi dan arah Kebijakan Rencana Strategi Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 mengacu pada RPD Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2024 dengan mengacu pada :

Tujuan dan Sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan.

Yaitu Tujuan 2 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia dan Kesejahteraan Masyarakat yang Berdaya Saing, Indikator Tujuan : Tingkat Kemiskinan Sasaran 5 : Meningkatkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat

Indikator Sasaran : Gini Ratio.

b. Strategi dan kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan

5.1.1 Strategi

Strategi dan kebijakan pembangunan Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan rumusan perencanaan komprehensif berdasarkan kebijakan tahunan dalam mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, maka dirumuskan strategi dan arah kebijakan dalam pencapaian sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang berikut berikut strategi pencapaian sasaraannya adalah:

1. Membuat draf rancangan perda dan perwako terkait perikanan tangkap dan perikanan budidaya
2. Peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap dan perikanan budidaya.
3. Pelatihan bimbingan teknis kepada nelayan, pembudidaya dan pelaku usaha hasil perikanan.
4. Penataan perizinan usaha perikanan.
5. Adanya fasilitas dari pemerintah untuk memperkuat modal usaha produk pengolahan ikan
6. Meningkatnya kebutuhan konsumsi ikan dengan adanya kampanye nasional Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan)
7. Meningkatkan Produksi Benih Melalui Optimalisasi Fungsi BBIL
8. Mengeluarkan benih ikan yang bersertifikat dari BBIL CPIB yang dapat didistribusikan ke para pembudidaya

5.2 Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Pokok-pokok arah kebijakan pembangunan berdasarkan skala prioritas penyelesaian akselerasi rencana strategis (Renstra) tahun 2024 – 2026. Kebijakan yang diambil Dinas Kelautan dan Perikanan dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Mengatur kejelasan kewenangan wilayah Perikanan Kota Pangkalpinang
2. Mempercepat peningkatan Sarana dan Prasarana Tangkap/Pembudiya dengan memberikan bantuan kepada Nelayan Pembudidaya Ikan
3. Memperbanyak pelatihan bimbingan teknis Kepada Nelayan/ Pembudidaya serta pelaku usaha hasil perikanan
4. Mempercepat proses perizininan usaha perikanan
5. Bantuan kredit pinjaman yang tepat dan aman untuk nelayan kecil dan Pembudidaya
6. Promosi dan Sosialisasi Gemarikan melalui Media Cetak, media Sosial, Elektronik dan Lomba Gemarikan
7. Pengadaan calon Indukan yang berkualitas
8. Mengadakan Bimtek dan sosialisasi terhadap Tenaga Teknis Balai, pembudidya ikan dan Nelayan
9. Mengadakan Bimtek dan sosialisasi terhadap Tenaga Teknis Balai, pembudidya ikan dan Nelayan
10. Membuat aplikasi/web /link SENYUMBUDIDAYAPGK

Keterkaitan antara strategi dan arah kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan dalam lima tahun mendatang dicantumkan pada tabel berikut ini:

Berikut Arah Kebijakan RENSTRA Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang Tahun 2024-2026 dapat dilihat pada martik dibawah ini :

Faktor Internal Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang

Kekuatan (Stength)	Kelemahan (Weaknes)
1. Tersedianya landasan hukum yang jelas dan mengacu pada bidang Perikanan	1. Sarana dan prasarana pendukung penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan belum optimal
2. Tersedianya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) tenaga perikanan	2. Belum meratanya kapasitas dan kualitas sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi
3. Adanya pendanaan bagi pelaksanaan urusan Perikanan	3. Belum optimalnya koordinasi internal antar unit kerja/bidang dalam melaksanakan tugas sebagaimana tugas dan tanggung jawab sesuai dengan fungsinya
4. Tersedianya layanan bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung (SIPD)	4. Usaha perikanan dipengaruhi oleh perubahan iklim dan cuaca
5. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi ikan	5. Belum optimalnya pengembangan ekonomi seperti masih rendahnya investasi yang menggunakan potensi

	komoditas unggulan dan sumberdaya daerah, rendahnya daya saing dan akses pemasaran produk unggulan daerah, belum optimalnya pemanfaatan sumberdaya lokal, dan masih rendahnya nilai tambah dan daya saing produk perikanan
--	--

Faktor Eksternal Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang

Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threat)
1. Adanya peningkatan kebutuhan benih ikan di kota Pangkalpinang	1. Ketersedian benih unggul untuk perikanan budidaya belum memadai
2. Balai Benih Ikan Lokal (BBIL) milik Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang dapat dijadikan sebagai sentra penghasil benih ikan berkualitas di Kota Pangkalpinang	2. Peran dan fungsi lembaga nelayan sebagai wadah organisasi belum berjalan secara optimal
3. Adanya kebutuhan pasar yang tinggi untuk produk hasil pengolahan ikan	3. Terbatasnya tenaga kerja yang terampil dan produktif di bidang perikanan
4. Adanya fasilitas dari pemerintah untuk memperkuat modal usaha produk pengolahan ikan	4. Pengaruh pasar global yang mensyaratkan adanya standarisasi produk perikanan sehingga tidak mampu bersaing dipasar global
5. Meningkatnya kebutuhan konsumsi ikan dengan adanya kampanye nasional Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan)	5. Masuknya ikan konsumsi dan ikan hias dari luar daerah

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Dalam menyusun rencana kerja setiap perangkat daerah di Kota Pangkalpinang harus mengacu pada kebijakan nasional dan provinsi. Acuan pada kebijakan nasional dan provinsi dimaksudkan agar perencanaan yang dibuat tidak menyimpang dari koridor pembangunan yang telah ditetapkan. Pencapaian tujuan perangkat daerah dapat sejalan dengan tujuan nasional.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN OPD

Rencana kerja yang disusun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang Tahun 2025 memuat 4 program prioritas pembangunan dengan 14 kegiatan dan 30 sub kegiatan yang menjadi isu strategis, yaitu sebagai berikut:

1. Program Penunjang Pemerintah Daerah

- Adminisrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Penyediaan bahan logistic kantor
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKP
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas oprasional atau lapangan
 - Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya

2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap

- Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
 - Penyediaan data dan informasi sumberdaya ikan
 - Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap
- Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan kemitraan usaha
- Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
 - Pelayanan penyelenggaraan tempat pelelangan ikan (TPI)

3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

- Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
 - Pemberi pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan Pendidikan dan pelatihan
- Pengelolaan Pembudidayaan Ikan
 - Penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan dalam satu daerah kabupaten/kota
 - Penyediaan prasarana pembudidaya ikan dalam satu daerah kabupaten/kota

4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

- Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
 - Penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam satu daerah kabupaten/kota berdasarkan skala usaha dan resiko

Program kerja yang akan dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang tahun 2025 sesuai dengan kewenangan dan uraian tugas dalam rangka pencapaian tujuan adalah sebagai berikut terlampir pada Tabel 4. di bawah ini.

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN						5.516.742.005,00							5.820.079.950,00	
	3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						5.516.742.005,00							5.820.079.950,00	
	3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						5.516.742.005,00							5.820.079.950,00	
1,	3.25.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	85 Nilai 70,00 Nilai			80 Nilai 69,7 Nilai	4.534.593.175,00						85 Nilai 70,00 Nilai	4.755.014.202,00	
	3.25.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP	100 %			100 %	2.723.846.675,00			-	Pembangu nan Ekonomi Percepatan Penangana n Kemiskinan Ekstrem	-	100 %	2.852.659.296,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				20 Orang/bulan	2.723.846.675,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Ekonomi Percepatan Penangana n Kemiskinan Ekstrem	-		2.852.659.296,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	-67 %			-50 %	140.000.000,00			-	Pembangu nan Ekonomi Percepatan Penangana n Kemiskinan Ekstrem	-	-67 %	147.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	140.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Ekonomi Percepatan Penangana n Kemiskinan Ekstrem	-		147.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	100 %			100 %	240.526.500,00			-	Pembangu nan Ekonomi Percepatan Penangana n Kemiskinan Ekstrem	-	100 %	244.450.900,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														

			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1.547.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Ekonomi Percepatan Peniangan n Kemiskinan Ekstrem	-		2.143.050,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	29.358.500,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Ekonomi Peningkata n Kualitas Ekonomi Kerakyatan	-		31.307.850,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	9.621.000,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Ekonomi Peningkata n Kualitas Ekonomi Kerakyatan	-		11.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	200.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Ekonomi Peningkata n Kualitas Ekonomi Kerakyatan	-		200.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan barang milik perangkat daerah	100 %			100 %	29.400.000,00			-	Pembangu nan Ekonomi Peningkata n Kualitas Ekonomi Kerakyatan	-	100 %	60.900.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				2 Unit	29.400.000,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Ekonomi Peningkata n Kualitas Ekonomi Kerakyatan	-		60.900.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %			100 %	563.270.000,00			-	Pembangu nan Ekonomi Peningkata n Kualitas Ekonomi Kerakyatan	-	100 %	553.094.006,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				1 Laporan	72.000.000,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Ekonomi Peningkata n Kualitas Ekonomi Kerakyatan	-		75.600.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	8.850.000,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangu nan Ekonomi Peningkata n Kualitas Ekonomi Kerakyatan	-		5.512.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

	3.25.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				1 Laporan	482.420.000,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Ekonomi Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan	-		471.981.506,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik</i>	100 %			100 %	837.550.000,00			-	Pembangunan Ekonomi Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan	-	100 %	896.910.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			<i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>				1 Unit	43.810.000,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Ekonomi Peningkatan Kualitas Ekonomi Kerakyatan	-		42.052.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			<i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i>				4 Unit	152.720.000,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Ekonomi Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem	-		182.857.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			<i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>				5 Unit	641.020.000,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Ekonomi Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem	-		672.000.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
2,	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	<i>Cakupan bina kelompok perikanan tangkap Jumlah Produksi Perikanan Tangkap</i>	71,11 % 1814.26 Ton			66,67 % 1649.33 Ton	179.956.000,00						71,11 % 1814.26 Ton	223.078.275,00	
	3.25.03.2.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah data dan sarana prasarana usaha perikanan tangkap</i>	3 Dokumen			1 Dokumen	113.812.500,00			-	Pembangunan Ekonomi Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem	-	1 Dokumen	95.475.975,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan														
			<i>Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>				1 Dokumen	42.450.000,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Ekonomi Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem	-		20.212.500,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap														
			<i>Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia</i>				85 Unit	71.362.500,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Ekonomi Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem	-		75.263.475,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.02	Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah	<i>Jumlah laporan kelompok nelayan yang terfasilitasi</i>	6 Kali			3 Kali	58.150.000,00			-	Pembangunan Ekonomi	-	3 Kali	121.317.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

		Kabupaten/Kota										Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem				
	3.25.03.2.02.0003	Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha														
			Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				250 Unit Usaha	58.150.000,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Ekonomi Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem	-		121.317.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Tersedianya tempat pelelangan hasil perikanan	1 Layanan			1 Layanan	7.993.500,00			-	Pembangunan Ekonomi Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem	-	1 Layanan	6.285.300,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.03.2.03.0002	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)														
			Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				1 Layanan	7.993.500,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Ekonomi Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem	-		6.285.300,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
3,	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Cakupan bidang kelompok perikanan budidaya Peningkatan produksi perikanan Budidaya	100 % 2550 Ton			96 % 850 Ton	695.313.549,00						100 % 900 Ton	688.079.228,00	
	3.25.04.2.02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Pembinaan Kelompok	35 Kali			25 Kali	313.655.821,00			-	Pembangunan Ekonomi Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem	-	35 Kali	336.394.612,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.02.0004	Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan														
			Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				20 Kelompok	313.655.821,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Ekonomi Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem	-		336.394.612,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Dokumen Dokumen Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	3 Dokumen			1 Dokumen	381.657.728,00			-	Pembangunan Ekonomi Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem	-	1 Dokumen	351.684.616,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	54.660.000,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Ekonomi Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem	-		50.337.000,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.04.2.04.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota														

			<i>Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				1 Unit	326.997.728,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Ekonomi Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem	-		301.347.616,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
4,	3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	<i>Persentase unit pengolahan ikan (UPI) yang dibina memenuhi standart mutu dan kemanan pangan</i>	55 %			55 %	106.879.281,00						55 %	153.908.245,00	
	3.25.06.2.01	Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	<i>Jumlah tanda daftar usaha pengolahan hasil perikanan yang diterbitkan</i>	3 Dokumen			1 Dokumen	106.879.281,00			-	Pembangunan Ekonomi Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem	-	1 Dokumen	153.908.245,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3.25.06.2.01.0005	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko														
			<i>Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko</i>				1 Dokumen	106.879.281,00	Kota Pangkal Pinang, Bukitintan, Air Mawar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Pembangunan Ekonomi Percepatan Penanganan Kemiskinan Ekstrem	-		153.908.245,00	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	J U M L A H							5.516.742.005,00								5.820.079.950,00

BAB V PENUTUP

Rancangan Awal Rencana Kerja (Ranwal Renja) Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang adalah dokumen perencanaan selama satu (1) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Adanya Rancangan awal (Ranwal) ini dapat memberikan gambaran singkat dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2023 disusun dalam rangka meningkatkan dan menciptakan kinerja pemerintah daerah yang efektif, optimal dan efisien dalam rangka mencapai tujuan program dan sasaran pembangunan. Rancangan Awal Rencana Kerja Tahun 2023 Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang penyusunannya dilakukan berdasarkan RPJP-D Kota Pangkalpinang tahun 2007- 2025, RPJMN 2014-2019 dan RPJMD Provinsi 2017-2022 serta mengacu pada kegiatan tahun-tahun yang lalu.

Beberapa hal yang menjadi hambatan dalam pencapaian program dan kegiatan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang, diharapkan dapat ditanggulangi dan dicarikan solusi terbaik pada masa yang akan datang. Pelaksanaan dan penyelenggaraan tupoksi harus terus dibenahi dari waktu ke waktu. Selain itu, koordinasi lebih ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas. Persoalan kapasitas dan kompetensi SDM setidaknya dapat terus ditingkatkan seiring dinamisasi SDM itu sendiri. Agar realisasi program kegiatan sesuai dengan sasaran maka diperlukan semangat, komitmen dan disiplin yang tinggi dari pelaksana pemerintahan dan segenap pemangku pembangunan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing

**KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KOTA PANGKALPINANG**

**DR. DAVID OKTAVIANDI,SP.,MT
PEMBINA TINGKAT I/ IVB
NIP. 197410262002121004**

